KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembangunan Adalah Instrumen Bagi Perdamaian dan Toleransi
Tanggal : Rabu, 23 Januari 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

Pembangunan Adalah Instrumen Bagi Perdamaian dan Toleransi

"Pembangunaan merupakan instrumen penting bagi upaya menciptakan perdamaian dan toleransi. Mustahil ada perdamaian tanpa ada pembangunan berkelanjutan," demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat berpidato sebagai Ketua Delegasi DPR RI dalam Sidang Tahunan APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) ke-27, Selasa, 15 Januari 2019, di Siem Reap, Kamboja.

Seluruh Ketua Delegasi berfoto bersama PM Hun Sen dalam acara pembukaan Sidang Tahunan ke-27 APPF.

Sidang Tahunan APPF dibuka secara meriah oleh para pemimpin Kamboja, mulai dari Heng Samrin, mantan Presiden Republik Rakyat Kamboja yang kini menjadi Ketua Parlemen Kamboja; dan tentu saja dibuka oleh Perdana Menteri Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja. Sidang Tahunan APPF kali ini dihadiri oleh delegasi dari 22 negara serta sejumlah organisasi dan negara peninjau.

Dalam sidang APPF kali ini, Ketua Delegasi Fadli Zon didampingi oleh delapan anggota delegasi, yaitu Dave Akbarshah Fikarno (F-Partai Golkar), Hasrul Azwar (F-PPP), Jalaluddin Rakhmat (F-PDI-P), Mercy Chriesty Barends (F-PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (F-Partai Golkar), Siti Masrifah (F-PKB), K.H. Surahman Hidayat (F-PKS), dan Achmad Farial (F-PPP).

Kawasan Asia Pasifik, yang terus berkembang menjadi mesin pendorong ekonomi global, memang harus memastikan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung di kawasan ini benar-benar kuat dan berkelanjutan, sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebab, saat ini kawasan Asia Pasifik masih menghadapi sejumlah konflik, seperti meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, perselisihan wilayah di Laut Timur dan Laut Cina Selatan, serta krisis Rohingya di Myanmar. "Masalah-masalah ini perlu solusi dan tak bisa diabaikan. Perdamaian dan stabilitas juga mustahil bisa dibangun jika kita lalai menyusun agenda pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan isu ketimpangan di kawasan," tegas Fadli.

Menurut Fadli, perdamaian, keamanan, serta pembangunan berkelanjutan akan menjadi tren di masa depan. "Sesudah perekonomian dunia berhasil mengatasi berbagai krisis yang terjadi pada abad ke-20, kini kita sedang berada di tengah era pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, seiring perubahan dunia yang berlangsung cepat, kompleks, dan tak terduga, skala tantangan yang dihadapi juga kian membesar. Ancaman akibat konflik bersenjata, sengketa wilayah, pelanggaran hak asasi manusia, dan meningkatnya terorisme, serta tantangan keamanan nontradisional seperti perubahan iklim, epidemi, dan kelangkaan sumber daya, merupakan contohnya," lanjut Fadli dalam pidatonya.

Paradigma pembangunan berkelanjutan telah menuntut kita untuk memikirkan kepentingan generasi mendatang secara serius. Kita dituntut untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan yang seimbang, serta berkurangnya jumlah konflik, terorisme, serta perang, sangatlah diperlukan. "Perang, terorisme, dan konflik menyebabkan kerusakan serius pada pembangunan, termasuk hilangnya nyawa manusia, rusaknya harta benda, lingkungan alam, dan turunnya aktivitas ekonomi serta kebebasan manusia," tambah Fadli.

Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk menjamin lingkungan global yang aman. Perang, terorisme, dan konflik bersenjata dapat membawa dampak merusak bagi pembangunan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah dicapai ketika keamanan dan perdamaian terjaga dengan baik.

Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan juga merupakan langkah penting menuju tiga pilar PBB yang lebih koheren, yaitu perdamaian dan keamanan serta pembangunan dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, DPR RI memandang bahwa sangat penting bagi anggota parlemen APPF untuk mendiskusikan, bertukar pandangan, serta berbagi praktik terbaik tentang bagaimana meningkatkan kerja sama di antara negara-negara anggota APPF, serta mengoptimalkan fungsi-fungsi parlementer yang akan berkontribusi pada implementasi efektif *Sustainable Development Goals* dan *Sustaining Peace*.

Dalam pidatonya, Fadli Zon juga menyampaikan pentingnya anggota parlemen dari negara-negara anggota APPF untuk bekerja sama dengan masing-masing pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mencari solusi damai dan menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan ini, karena situasi yang stabil akan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan mempertahankan perdamaian.

Di sela-sela kegiatan APPF, Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon sempat melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen Rusia, yang dipimpin oleh Ilias Umakhanov. Dalam pertemuan tersebut delegasi Rusia menyampaikan keinginannya untuk ikut meninjau proses Pemilu 2019. Mereka ingin mengikuti dari dekat pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar tersebut.

"Parlemen kita juga biasa diundang untuk mengamati proses pemilu di negara lain. Begitu juga halnya dengan Pemilu pada April nanti, kita bisa juga mengundang delegasi parlemen dari negara lain untuk meninjau pesta demokrasi di negara kita," terang Fadli.

Selain menyampaikan ketertarikannya untuk menjadi peninjau, delegasi Rusia juga mengutarakan apresiasinya terhadap peran parlemen perempuan di Indonesia yang dianggap telah menunjukkan kiprah yang baik di panggung diplomasi parlemen, khususnya APPF.

Sidang Tahunan ke-27 APPF di Siem Reap, Kamboja, yang rangkaian kegiatannya telah dimulai sejak 14 Januari 2019, resmi ditutup pada Rabu, 16 Januari 2019. *